

**PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN
DALAM MENYUKSESKAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014
DI KELURAHAN SUNGAI LEKOP KABUPATEN BINTAN**

Rani Safitri, S.Sos & Dr. Oksep Adhayanto., MH

Alumni Program Studi Ilmu Pemerintahan & Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam dunia politik (Efriza, 2012). Partisipasi perempuan dalam dunia politik masih rendah, hal ini dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki dan jargon politik yang tidak memihak pada perempuan. Pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini juga berlaku bagi kaum perempuan yang tidak hanya bisa berpartisipasi sebagai pemilih, tapi juga dalam bentuk lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014. Kelurahan Sungai Lekop adalah lokasi yang dipilih dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap informan, observasi, dan studi pustaka terhadap data primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah sebagai pemilih, tim sukses, saksi, mengikuti kegiatan sosialisasi caleg dan PPS, menjadi anggota PPDP dan anggota KPPS. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan adalah kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan dan pengalaman berorganisasi.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilu, Perempuan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Yaitu suatu sistem dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan perkembangannya, terdapat dua pendekatan dalam memahami demokrasi, yaitu demokrasi

minimalis dan demokrasi maksimalis. Demokrasi minimalis diartikan sebagai demokrasi yang ditekankan pada membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (dalam Safiyah, tt:167). Sehingga dalam hal ini muncul istilah pemilihan umum. Pendekatan yang kedua disebut dengan demokrasi maksimalis yaitu demokrasi yang lebih ditekankan terhadap jaminan hak-hak warga negara (Manan, 2012:503). Berdasarkan hal inilah istilah partisipasi muncul sebagai syarat mutlak dari sebuah demokrasi itu sendiri.

Partisipasi warga negara di Indonesia mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan demokrasi yang dianut oleh Indonesia sendiri. Terutama dialami oleh kaum perempuan, yaitu warga negara yang masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, partisipasi perempuan dalam politik bahkan dimulai saat Indonesia masih dalam masa penjajahan. Sementara itu, menurut catatan sejarah keterwakilan perempuan juga sangat kurang terwakili di lembaga DPR Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari tabel yang penulis sajikan berikut:

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan di DPR

| No | Periode | Keterwakilan Perempuan (%) |
|-----------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 1955-1960 | 5,06% |
| 2 | 1971-1977 | 7,17% |
| 3 | 1977-1982 | 8,04% |
| 4 | 1982-1987 | 9,13% |
| 5 | 1987-1992 | 11,60% |
| 6 | 1992-1997 | 12,60% |
| 7 | 1999-2004 | 11,40% |
| 8 | 2004-2009 | 10,18% |
| 9 | 2009-2014 | 17,32% |

Sumber: UNDP,2010:3

Senada dengan lembaga legislatif pusat itu, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah juga belum menunjukkan angka keseimbangan dengan laki-laki. Salah satunya adalah di Propinsi Kepulauan Riau. Lebih lengkap penulis sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Daerah Kepri
Periode 2009-2014

| No | Lembaga | Keterwakilan Perempuan (%) |
|----|-------------------------|----------------------------|
| 1 | DPRD Provinsi Kepri | 11 |
| 2 | DPD Kepri | 25 |
| 3 | DPRD Kabupaten Bintan | 20 |
| 4 | DPRD Kabupaten Anambas | 5 |
| 5 | DPRD Kabupaten Natuna | 5,26 |
| 6 | DPRD Kabupaten Karimun | 6,67 |
| 7 | DPRD Kabupaten Lingga | 0,01 |
| 8 | DPRD Kota Batam | 22,22 |
| 9 | DPRD Kota Tanjungpinang | 12 |

Sumber: KPPPA, 2013 (dalam <http://www.menegpp.go.id/>)

Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Kepulauan Riau pada periode 2009-2014 memiliki keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten sebesar 20%. Meskipun belum memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan, namun prosentase ini cukup menggembirakan. Hal ini dikarenakan dapat memacu kaum perempuan di Kabupaten Bintan untuk turut serta termotivasi terjun ke dunia politik. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Nur Imam Subono (dalam Jurnal Sosial Demokrasi, 2009:57) yang mengatakan bahwa perempuan yang telah duduk di lembaga legislatif akan menjadi "*role model*" bagi perempuan lainnya. Tahun 2014 merupakan tahun yang keempat kalinya pemilu dalam era reformasi diadakan. Ini merupakan kesempatan bagi kaum perempuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, dimana dalam segi kuantitas kaum perempuan dan kaum laki-laki tidaklah jauh berbeda.

Fenomena ini juga terlihat di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan, tempat penulis melakukan penelitian. Dari data KPU setempat tercatat bahwa jumlah pemilih laki-laki sebanyak 2.405 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 2.212 (<http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html>). Pada pemilihan Bupati Kabupaten Bintan tahun 2010, tercatat tingkat partisipasi kaum perempuan sebanyak 69%, sementara itu pada pemilu legislatif tahun 2014 tingkat partisipasi kaum perempuan sebagai pemilih meningkat menjadi 80,25%.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bintan, terlihat bahwa tingkat partisipasi politik kaum perempuan sebagai pemilih di Kelurahan Sungai Lekop meningkat cukup tajam. Namun, partisipasi kaum perempuan sebagai pemilih saja belum menjamin bahwa pemilu sebagai realisasi dari demokrasi berjalan dengan adil. Hal ini dikarenakan kaum perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya. Perempuan dalam politik pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini telah terjamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan pasal 28.

Namun pada kenyataannya, kaum perempuan memiliki kondisi yang berbeda yang diakibatkan oleh budaya patriarki dan bahasa politik yang kurang memihak. Potret sederhana dari patriarki dewasa ini terlihat dari pembagian tugas dalam kehidupan rumah tangga. Perempuan yang berperan sebagai istri dan ibu di rumah selalu dibebankan tugas seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Sementara sang laki-laki sebagai kepala rumah tangga lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah karena perannya sebagai pencari nafkah utama.

Sementara itu bahasa politik yang kurang memihak salah satunya adalah "*perempuan tidak perlu berpolitik*". Jargon ini seolah menggambarkan bahwa

dunia politik adalah dunia laki-laki yang tidak boleh dimasuki perempuan. Perempuan yang digambarkan sebagai sosok yang halus dan lembut tidak cocok berada dalam ranah politik yang penuh intrik dan kotor (Manurung, 2009:54).

Berangkat dari uraian tersebut, penelitian yang penulis lakukan ini akan memfokuskan pada partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Kajian yang penulis lakukan ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Herdiansyah, 2010:9).

LANDASAN TEORI

1. Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti (1992:180) partisipasi politik adalah keikutsertaan warganegara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya. Maksud disini adalah ikut mempengaruhi isi kebijakan umum, ikut membuat dan melaksanakan keputusan politik.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi politik

Gabriel A. Almond membagi partisipasi politik menjadi dua bentuk yaitu, partisipasi konvensional dan nonkonvensional. Dalam meneliti partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif, maka bentuk

partisipasi politik konvensional yang akan menjadi pijakan. Adapun bentuk partisipasi konvensional tersebut terdiri dari : Pemungutan Suara, Diskusi Politik, Kegiatan Kampanye dan Bergabung Dalam Kelompok Kepentingan.

3. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Faktor- faktor yang mempengaruhi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti antara lain: Kesadaran Politik, Sikap dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Status Sosial dan Status Ekonomi dan Afiliasi Politik Orangtua & Pengalaman Organisasi.

PEMBAHASAN

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Perempuan

a. Pemilih

Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam menyelesaikan pemilu legislatif tahun 2014 merupakan bentuk partisipasi politik perempuan yang paling banyak dilakukan. Berdasarkan data KPU diketahui bahwa dari 2.212 kaum perempuan yang terdaftar menjadi pemilih, 1.773 telah memberikan hak suaranya sebagai pemilih. Hal ini mengindikasikan bahwa 80,15% kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop telah ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan pemilu legislatif tahun 2014. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Riduan, S.Sos, selaku Lurah Sungai Lekop berikut: *"Partisipasi kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sebagai pemilih sudah sangat baik. Dari 2.212 yang terdaftar sebagai pemilih, 1.773 orang telah memberikan hak suaranya."*

b. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari Caleg

Selain menjadi pemilih, bentuk partisipasi politik perempuan lainnya dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh caleg. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan penulis yaitu Soifah. Soifah mengatakan bahwa ia pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang ada di lingkungan rumahnya.

c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dari PPS

Selain mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh caleg, bentuk partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu di kelurahan Sungai Lekop lainnya adalah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS. Hal ini disampaikan oleh Bapak Sunardi, S.E selaku Ketua PPS juga menyatakan bahwa kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh PPS.

d. Menjadi Saksi

Selain melakukan partisipasi pasif seperti pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi, partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga menjadi partisipasi aktif. Salah satunya adalah saksi dalam kegiatan pemungutan suara. Berkaitan dengan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 9 April 2014 yang lalu, maka saksi dalam pemungutan suara terbagi menjadi dua, yaitu saksi untuk partai dan saksi untuk calon anggota DPD.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa terdapat kaum perempuan yang ikut serta berpartisipasi sebagai saksi, beberapa diantaranya adalah Ibu Dwi Haryanti yang menjadi saksi di TPS 4 dan Yola yang menjadi saksi di TPS 2. Hal ini juga diperkuat

dengan pernyataan Bapak A. Effendi yang menyatakan bahwa di lingkungan tempat tinggalnya sudah ada 5 orang kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai saksi di tempat pemungutan suara.

e. Menjadi Tim Sukses

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa terdapat partisipasi politik perempuan menjadi tim sukses, yaitu Ibu Enok Suhayati.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Ibu Enok Suhayati, diketahui bahwa awal keterlibatannya bisa menjadi tim sukses dikarenakan calegnya sendiri yang memintanya untuk menjadi tim suksesnya. Berikut adalah pernyataannya: *“Saya mau menjadi Timses karena sebelumnya saya sudah mengenal caleg yang saya pilih ini pada pemilu sebelumnya. Selain itu bapak caleg itu sendiri yang datang langsung ke rumah dan meminta saya. Saya juga telah mengenal tokoh dengan baik. Selain itu saya juga melihat kalau caleg yang saya pilih ini mempunyai program kerja yang nyata, yaitu bapak suka langsung menolong orang yang sakit meskipun bapak sibuk.”*

f. Menjadi anggota KPPS

Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sendiri sudah ada yang terlibat dalam keanggotaan KPPS. Salah satunya adalah Ibu Juliani. Selain sebagai anggota KPPS, Ibu Juliani juga merupakan Ketua RT 01 RW 05 Kelurahan Sungai Lekop. Adapun awal mulanya Ibu Juliani dapat terlibat menjadi anggota KPPS adalah sebagai berikut:

“Pertama ada penjaringan dan musyawarah yang dilakukan di RW. Kemudian setelah musyawarah itu saya terpilih menjadi salah satu anggota KPPS. selain karena memang terpilih, saya juga ada keinginan sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya menjadi KPPS”. Menurut data KPU

Kabupaten Bintan juga tercatat bahwa terdapat 15 orang dari total 77 orang, kaum perempuan yang menjadi anggota KPPS di Kelurahan Sungai Lekop.

g. Menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa kaum perempuan juga sudah berpartisipasi menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sunardi, S.E. sebagai berikut: *“Kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop juga sudah ada yang menjadi petugas pemutakhiran data pemilih. Misalnya di RW 05 ini sudah ada 2 orang kaum perempuan yang kita libatkan dalam petugas pemutakhiran data pemilih pada pemilu legislatif tahun 2104”*.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Perempuan dalam Menyukseskan Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop

a. Kesadaran akan Hak dan Kewajiban dalam Pemilu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap informan kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop, kesadaran politik kaum perempuan terhadap hak dan kewajiban berpolitiknya di dalam pemilu ditunjukkan oleh kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai Anggota KPPS, PPDP, Saksi, dan Tim Sukses.

Sementara itu, kesadaran politik kaum perempuan terhadap hak dan kewajiban politiknya dalam pemilu tidak ditunjukkan kepada yang berpartisipasi sebagai pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Ibu Endang yang menyatakan bahwa beliau mengikuti kegiatan sosialisasi karena diajak ibu-ibu sekitar. Sementara itu beliau memberikan hak suaranya karena diberi uang.

b. Manfaat Adanya Pemilu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sudah menyadari akan manfaat pemilu. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka yang ikut dalam berbagai macam bentuk partisipasi politik.

Pernyataan manfaat adanya pemilu dari bentuk partisipasi politik perempuan sebagai tim sukses, terlihat dari pernyataan Ibu Enok Suhayati yang menyatakan bahwa dengan adanya pemilu beliau bisa memiliki tempat bernaung dari orang-orang yang sudah duduk di parlemen.

Tidak berbeda jauh dengan pernyataan kaum perempuan sebagai tim sukses, Ibu Juliani dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS dan saksi menyatakan bahwa dengan adanya pemilu mereka bisa memilih pemimpin mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan aspirasi mereka mengenai apa yang mereka butuhkan.

Sementara itu pernyataan manfaat akan adanya pemilu dari bentuk partisipasi sebagai pemilih terlihat dari pernyataan Ibu Endang yang menyatakan bahwa dengan adanya pemilu akan membuat negara lebih baik dan tidak akan ada lagi kkn.

c. Kepercayaan Terhadap Sistem Pemilu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, diketahui bahwa kepercayaan perempuan terhadap sistem pemilu sudah baik. Hal ini terlihat dari pernyataan Ibu Juliani sebagai berikut: *“Pekerjaan saya ketika menjadi anggota KPPS tidak mengganggu kak, kan saya sudah tahu jadwalnya dari jauh-jauh hari jadi bisa dipersiapkan. Lagipula saya sudah dikasih ijin sama suami...”*

Ibu Dwi Haryanti, juga menyatakan sebagai berikut: *"Ibu jadi saksi memang dipilih langsung dari calegnya, tetapi ibu sendiri juga ingin mengetahui bagaimana jadi saksi. Kebetulan Ibu juga pernah jadi saksi pada pemilu tahun 2009, karena ini ditawarkan lagi ibu mau aja. Ini kan tugas negara juga, malah ibu kepengen gak cuma jadi saksi aja, tapi juga pengen jadi anggota panitia pemilu kayak PPS gitu..."*

Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kaum perempuan mempunyai kepercayaan terhadap sistem pemilu, sehingga mereka bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

d. Kepercayaan Terhadap Caleg

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa kepercayaan kaum perempuan terhadap caleg sudah baik. Hal ini terlihat dari adanya partisipasi politik perempuan sebagai tim sukses dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Ibu Enok Suhayati, yang berpartisipasi sebagai tim sukses menyatakan keikutsertaannya sebagai berikut: *"Ibu mau menjadi tim sukses karena ibu diminta langsung oleh caleg tersebut. Lagipula Ibu juga sudah kenal dengan caleg tersebut, karena caleg tersebut merupakan tetangga ibu dulu di tempat tinggal ibu yang lama. Beliau itu adiknya ketua RT. Jadi ibu mau, lagipula Ibu lihat kerja beliau terbukti suka menolong orang meskipun sibuk..."*

Selain dari itu, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak A. Effendi selaku ketua RW 06 dan Ketua KPPS yang menyatakan bahwa partisipasi kaum perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi di lingkungannya sudah baik. Berikut adalah pernyataannya: *"Kegiatan sosialisasi disini diadakan di rumah salah satu warga mbak, banyak juga kaum perempuan yang ikut mbak, mulai*

dari umur 17 sampai yang sudah tua juga ada. Tetapi lebih banyak ibu-ibu yang ngikutinnya mbak”

Berdasarkan informasi dari informan tersebut, terlihat bahwa kepercayaan perempuan terhadap caleg sudah baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kaum perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh caleg.

e. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop mengenai partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi politik perempuan, terutama bagi mereka yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS, PPDS dan saksi. Hal ini seperti terlihat dari pernyataan Ibu Juliani yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS sebagai berikut: *“Pertama ada penjaringan dan musyawarah yang dilakukan di RW. Kemudian setelah musyawarah itu saya terpilih menjadi salah satu anggota KPPS. selain karena memang terpilih, saya juga ada keinginan sendiri untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya menjadi KPPS”*.

Pernyataan Ibu Juliani tersebut, terlihat bahwa ada kesadaran tersendiri dari Ibu Juliani untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana cara kerja menjadi KPPS. Hal ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan Ibu Juliani berpengaruh terhadap partisipasi politiknya. Selain itu, sebagai anggota KPPS tingkat pendidikan sangat berpengaruh, hal ini dikarenakan tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014.

Peraturan komisi pemilihan umum tersebut, tercantum bahwa dalam pasal 3 huruf h yang menyatakan bahwa persyaratan anggota PPK, PPS, dan KPPS berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Sejalan dengan peraturan tersebut, dari hasil penelitian penulis terbukti bahwa semua kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS telah menempuh pendidikan minimal SMA atau sederajat. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Tingkat Pendidikan Kaum Perempuan Sebagai Anggota KPPS

| No | Nama | Pendidikan | Kedudukan |
|----|------------------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Nurbaiti | Paket C Dinas Pendidikan Bintan | Anggota KPPS |
| 2 | Ina Suriyana | S1 UMRAH | Anggota KPPS |
| 3 | Sri Lestari | Paket C Dinas Pendidikan Bintan | Anggota KPPS |
| 4 | Julainah | SMKN 1 Tanjungpinang | Anggota KPPS |
| 5 | Nurlaily | SMEA Swasta Pembangunan | Anggota KPPS |
| 6 | Sarbini | SMA Swasta Islam Kepanjen | Anggota KPPS |
| 7 | Ritawati | SMA Swasta Kencana Bandung | Anggota KPPS |
| 8 | Juliani | Paket C Dinas Pendidikan Bintan | Anggota KPPS |
| 9 | Rosni | SMA Swasta Piri II Yogyakarta | Anggota KPPS |
| 10 | Nurlela | SMAN 2 Tanjungpinang | Anggota KPPS |
| 11 | Astuti | SMEA Swasta Indrasakti Tanjungpinang | Anggota KPPS |
| 12 | Rubiah | Pendidikan Guru Agama Negeri | Anggota KPPS |
| 13 | Oktariyanti | SMK Swasta Indrasakti | Anggota KPPS |
| 14 | Ekwanti | SMK Taman Siswa Nanggulan | Anggota KPPS |
| 15 | Rosmida Yanti S. | SMU Swasta Tri Bhakti Pekanbaru | Anggota KPPS |

Sumber: KPU Kabupaten Bintan, 2014

Sementara itu, bentuk partisipasi politik perempuan sebagai saksi juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini juga dibuktikan dari informan yang penulis wawancarai yaitu Yola dan Ibu Dwi Haryanti yang berpartisipasi sebagai saksi. Pada saat menjadi saksi Yola telah menempuh pendidikan SMA dan sedang menempuh pendidikan S1. Sementara itu, Ibu Dwi Haryanti pendidikan terakhirnya adalah SMA.

Selain dari hasil penelitian yang penulis temukan di lapangan, pengaruh tingkat pendidikan terhadap kegiatan politiknya sebagai saksi juga dinyatakan oleh Bapak A. Effendi sebagai berikut: *“Pendidikan sangat berpengaruh mbak, misalkan dia menjadi saksi kan tugasnya monitoring hasil suara di TPS, terus nanti disampaikan kepada partai atau calegnya. Jadi kalau gak dibarengi pendidikan yang cukup kemungkinan gak bisa melaksanakannya mbak, kan nanti dia harus mengolah data juga.”*

Bapak Muhammad Riduan S, Sos. Selaku Kepala Kelurahan Sungai Lekop juga turut memberikan pandangannya sebagai berikut: *“Ada keterkaitan antara bentuk partisipasi politik dengan pendidikan seseorang. Hal ini dikarenakan dimana semakin tinggi pendidikan yang diperoleh seseorang. Maka pengetahuannya semakin luas dan semakin terbuka sehingga semakin menyadari akan pentingnya pemilu.”*

f. Tingkat Pekerjaan

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan ditemukan bahwa tingkat pekerjaan tidak berpengaruh terhadap kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai pemilih dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini dikarenakan pada hari dilaksanakan pemilu, merupakan hari libur nasional sehingga semua kegiatan perkantoran diliburkan. Sementara itu bagi yang bekerja sebagai karyawan toko, kegiatan dilakukan pada siang hari. Sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi hak mereka memberikan suara. Hal ini terlihat dari informan penulis yang bernama Dina dan Ibu Endang.

Sama halnya dengan partisipasi politik perempuan dalam mengikuti kegiatan sosialisasi, tingkat pekerjaan juga tidak mempengaruhi partisipasi mereka. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi yang diadakan baik oleh caleg maupun dari PPS selalu diadakan pada saat kaum perempuan memiliki banyak waktu luang

dan kegiatan sosialisasi tersebut dibarengi dengan kegiatan lainnya. Mengenai hal ini penulis temukan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Kelurahan Sungai Lekop selalu diadakan pada sore dan malam hari. Selain itu kegiatan sosialisasi ini dibarengi dengan kegiatan majelis taklim atau ibu-ibu pengajian.

g. Pengaruh Keluarga dan Lingkungan

Pengaruh politik keluarga atau orang terdekat terhadap partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sangat besar sekali, bahkan faktor yang paling utama. Hal ini dikarenakan tidak hanya dalam bentuk partisipasi politik sebagai pemilih saja, tetapi juga sebagai saksi, tim sukses, dan mengikuti kegiatan sosialisasi. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan informan yang penulis wawancarai untuk mendapatkan informasi.

Ibu Dwi Haryanti, yang menyatakan sebagai berikut: *"Awalnya bisa terlibat menjadi saksi karena pertama karena saya diminta oleh partai. Jadi saya mau. Saya menjadi saksi dari calon DPD"*

Yola Aprilia, yang juga berpartisipasi sebagai saksi memberikan pernyataannya sebagai berikut: *"Awal saya bisa jadi saksi karena saya ditelpon sama caleg yang sudah saya kenal kak"*

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara terlihat bahwa mayoritas kaum perempuan berpartisipasi politik dikarenakan dipengaruhi oleh keluarga maupun orang terdekatnya. Hal ini terlihat dari pernyataan seperti diminta oleh caleg langsung, ditelpon oleh caleg yang dikenal, dan diajak ibu-ibu sekitar rumah, diajak oleh tokoh masyarakat dan diajak oleh ibu sendiri.

h. Pengalaman Organisasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa pengalaman organisasi juga faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop. Faktor ini terutama berpengaruh bagi kaum perempuan yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS, PPDP, tim sukses dan saksi. Sementara untuk partisipasi politik perempuan lainnya faktor ini tidak terlalu berpengaruh.

Ibu Dwi Haryanti, yang berpartisipasi sebagai saksi, selain dipengaruhi oleh afiliasi politik juga dipengaruhi pengalaman organisasi. Hal ini terlihat dari pernyataannya yang menyatakan bahwa awal ia bisa menjadi saksi dikarenakan selain diminta langsung oleh parpol tetapi juga dikarenakan ia pada pemilu sebelumnya sudah pernah menjadi saksi. Ibu Juliani, yang berpartisipasi sebagai anggota KPPS dan PPDP dalam partisipasinya juga dipengaruhi oleh afiliasi politik dan pengalaman organisasi. Hal ini terlihat dari kedudukan Ibu Juliani yang juga sebagai ketua RT 01 RW 05.

Selain itu, dari hasil analisis data penulis terhadap anggota KPPS dan PPDP di Kelurahan Sungai Lekop, terlihat bahwa sebagian besar anggota KPPS dan PPDP yang terlibat merupakan ketua RT dan ketua RW setempat. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Sunardi, S.E. selaku Ketua PPS sebagai berikut: *“Sistem perekrutannya pertama kita adakan penjangkaran terhadap masyarakat dulu. Kita juga kerjasama dengan RT dan RW yang ada di Kelurahan Sungai Lekop jadi kita menampung aspirasi dari masyarakat. Selain itu kita juga libatkan RT dan RW karena mereka yang mengetahui warganya. Kita juga menunjuk langsung petugas pematakhiran data pemilih tersebut. Selain memang dari RT kita juga libatkan dari luar RT. Jadi tugas mereka itu seperti sensus lah”*.

Bapak Muhammad Riduan, S.Sos. selaku Lurah sungai Lekop juga memberikan pernyataannya terkait dengan faktor pengalaman organisasi dalam partisipasi politik. Berikut adalah pernyataannya: *“Ada keterkaitan antara pengalaman organisasi dengan partisipasi politik. Jika seseorang sering ikut berorganisasi meskipun pendidikannya rendah, maka akan lebih terbuka kesempatannya untuk mengikuti partisipasi politik lainnya dikarenakan wawasannya lebih luas dan terbuka”*

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014, diketahui bahwa partisipasi politik perempuan di Kelurahan Sungai Lekop sudah baik. Hal ini terlihat dari kaum perempuan yang sudah terlibat dari berbagai bentuk partisipasi politik dalam pemilu legislatif. Adapun bentuk partisipasi politik perempuan yang diikuti kaum perempuan di Kelurahan Sungai Lekop adalah menjadi pemilih, mengikuti kegiatan sosialisasi dari caleg & PPS, menjadi saksi, menjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPDP dan menjadi tim sukses. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan antara lain adalah: kesadaran hak dan kewajiban dalam pemilu, manfaat adanya pemilu, kepercayaan terhadap sistem pemilu, kepercayaan terhadap caleg, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, pengaruh keluarga dan lingkungan & pengalaman organisasi.

Namun, dari kedelapan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik kaum perempuan dalam menyukseskan pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sungai Lekop, faktor yang paling berpengaruh adalah pengaruh keluarga & lingkungan serta pengalaman organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Budiardjo, Mirriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana.
- Echols, John dan Hassan Shadily, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan ke XXVI, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama.
- Efriza, 2012, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta.
- Faturohman, Denden dan Wawan Sobari, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press.
- Faulks, Keith, 2010, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, Bandung: Nusa Media.
- Hendrayadi, Agus dkk, 2011, *Pedoman Teknik Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi serta ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji*, Tanjungpinang: Umrah Press.
- Herdiansyah, Haris, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, 1990, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lilijawa, Isidorus, 2010, *Perempuan, Media dan Politik*, Flores: Ledalero.
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Profil Kelurahan Sungai Lekop, 2013
- Sasono, Adi dkk, 1998, *Demitologisasi Politik Indonesia Mengusung Elitisme dalam Orde Baru*, Jakarta: CIDESINDO.
- Silalahi, Ulber, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.
- Sitepu, P.Andrianus, 2012, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Internet, Jurnal dan Buletin

- Darwin, Muhadjir, 2004, *Gerakan Perempuan Indonesia Dari Masa ke Masa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Volume 7 Nomor 3, Edisi Maret (dalam <http://journalsospol.fisipol.ugm.ac.id>, akses 5 Januari 2014 pukul 8.52 WIB)

- KPPPA, dan BPS, 2013, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dalam <http://www.menegpp.go.id/>, akses 1 Mei 2014 pukul 08.08 WIB)
- Manan, Munafrizal, 2012, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 9 Nomor 4, Edisi Desember.
- Manurung, Rosida Tiurma, 2009, *Ketidakterpikirkan Jargon Politik Terhadap Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Socioteknologi Edisi 16 Tahun 8, April 2009, Bandung: Universitas Kristen Maranatha Press.
- Pamungkas, Sigit, 2013, " *Ketua KPU Harap Media Lebih Banyak Mengulas Sisi Positif Pemilu*", Dalam Jurnal Suara KPU, Edisi Juli, Tahun 2013, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Ratnawati, 2004, *Potret Kuota Perempuan di Parlemen*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7, Nomor 3, Maret 2004.
- Sofiyah, Siti Lailatus, tt, *Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan Sebagai Upaya Demokratisasi di Indonesia* (dalam <http://ejournal.uin-malang.ac.id>, akses 15 Februari 2014 pukul 02.51 WIB)
- Subono, Nur Imam, 2009, " *Perempuan yang lebih Bermakna*", Dalam Jurnal Sosial Demokrasi, Edisi 6 Tahun 2, Juni-Agustus 2009, Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.
- Suryaningsih, 2011, " *Peluang Kerja dan Transmigrasi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia*", Dalam Jurnal FISIP UMRAH, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011, Tanjungpinang: UMRAH Press.
- UNDP, 2010, *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan*, Makalah Kebijakan, Jakarta: UNDP Indonesia.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Patriarki>, akses 29 Januari 2014 pukul 09.47 WIB
- http://id.wikipedia.org/wiki/pemilihan_umum_di_Indonesia, akses 10 Februari 2014 pukul 02.07 WIB
- <http://www.kpu.go.id>, akses 13 Oktober 2013 pukul 12.06 WIB
- <http://www.kpu.go.id/dptnasional.html>, akses 10 April 2014 pukul 01.11 WIB
- <http://www.kpu.go.id/dptseilekop.html>, akses 10 April 2014 pukul 01.14 WIB
- <http://www.bps.go.id.html>, akses 15 April 2014 pukul 11.15 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014